

# China's Dedollarization Policy Through BRICS Cooperation in 2022-2023

## *Kebijakan Dedolarisasi Tiongkok Melalui Kerja Sama BRICS Tahun 2022-2023*

**Diva Calista Hananto & Wiwiek Rukmi Dwi Astuti**

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*

### **ABSTRACT**

*The momentum challenging the dominance of the US dollar in the international financial system resurfaced in 2022 when Russia faced sanctions from the West. China, responding to the instability caused by the dollar's dominance, has pursued strategic dedollarization through BRICS cooperation. This research analyzes China's dedollarization efforts using a qualitative approach rooted in monetary policy and dedollarization theory. Key initiatives include the development of the New Development Bank (NDB), Bilateral Swap Agreements (BSA), and the Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), all aimed at reducing dependence on the Western-controlled financial system. These efforts have garnered attention from the United States due to their potential long-term impact on dollar hegemony. China's indirect leadership within BRICS highlights its role in shaping dedollarization policies, particularly in the aftermath of the 2022 sanctions against Russia. While these measures are still far from rivaling the US dollar's dominance, they signal a shift towards a multipolar global monetary system with the potential for significant changes in global financial dynamics in the future.*

**Keywords:** *Dedollarization, China, BRICS*

*Momentum tantangan terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional kembali muncul pada tahun 2022 ketika Rusia menerima sanksi dari Barat. Sebagai respons terhadap ketidaksetaraan dan ketidakstabilan akibat dominasi dolar, Tiongkok melalui kerja sama dengan BRICS mengambil berbagai langkah strategis dedolarisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Tiongkok dalam kebijakan dedolarisasi melalui aliansi BRICS, menggunakan metode kualitatif berdasarkan data sekunder, dengan pendekatan teori kebijakan moneter dan dedolarisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tiongkok telah menjadi penggerak utama dalam beberapa kebijakan dedolarisasinya melalui kerja sama BRICS, seperti pengembangan New Development Bank (NDB), pembentukan Perjanjian Penukaran Bilateral (BSA), dan pengembangan Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), yang semuanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan global yang dikendalikan Barat. Dalam konteks geopolitik global, upaya dedolarisasi Tiongkok menjadi perhatian khusus bagi Amerika Serikat, terutama karena potensi pengaruhnya terhadap dominasi dolar dalam jangka panjang. Kepemimpinan tidak langsung Tiongkok dalam BRICS menunjukkan bagaimana negara ini mengembangkan kebijakan dedolarisasinya, terutama setelah sanksi terhadap Rusia pada awal 2022. Meskipun masih jauh dari menyaingi dominasi dolar AS, langkah-langkah ini menunjukkan pergeseran menuju multipolaritas dalam sistem moneter global, dengan potensi dampak besar pada dinamika keuangan global di masa depan.*

**Kata-kata Kunci:** *Dedolarisasi, Tiongkok, BRICS*

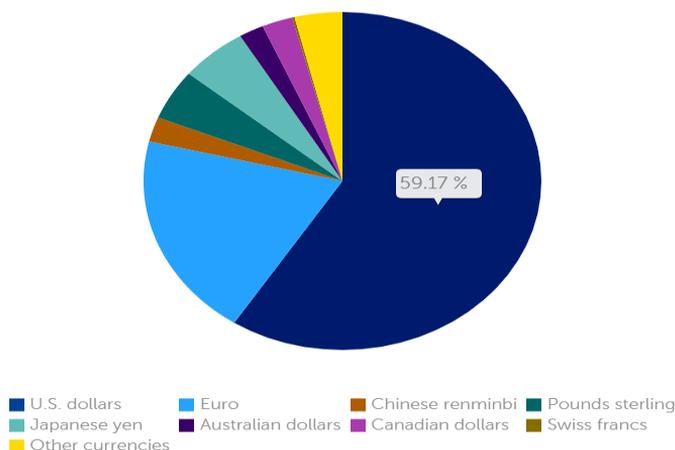
*China's Dedollarization Policy Through  
BRICS Cooperation in 2022-2023*

Dominasi dolar Amerika Serikat (USD) sebagai mata uang cadangan global telah menjadi salah satu topik utama dalam ekonomi internasional sejak akhir Perang Dunia Kedua. Dominasi ini berakar dari penandatanganan Perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944, yang secara resmi menetapkan USD sebagai utama dunia. Kesepakatan ini bukan hanya menetapkan USD sebagai standar internasional, tetapi juga menciptakan sistem moneter yang menempatkan Amerika Serikat di posisi terdepan. Sejak saat itu, kekuatan ekonomi Amerika Serikat bersama dominasi USD memiliki fondasi yang kuat dalam sistem keuangan global.

Pada tahun 2023, USD menyumbang sekitar 60% dari total cadangan devisa bank sentral global. Sekitar setengah dari perdagangan internasional dan surat utang global dinyatakan dalam USD (Congressional Research Service (CRS) 2022). Menurut data Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (2023), yang diungkapkan oleh IMF secara triwulanan, USD menyumbang 59,17% dari 11,9 triliun dolar total cadangan devisa kuartal ketiga 2023 (Lihat Gambar 1). Hal ini membuat dolar Amerika Serikat menjadi mata uang yang paling banyak digunakan di dunia.

**Gambar 1.**  
**Cadangan Mata Uang Asing 2023**

World - Allocated Reserves by Currency for 2023Q3



*Sumber: International Monetary Fund (2023)*

Dominasi USD dalam cadangan devisa global menggambarkan kepercayaan tinggi dari negara-negara di seluruh dunia terhadap stabilitas dan kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Hal ini juga mencerminkan ketergantungan negara-negara lain pada USD untuk perdagangan internasional dan keuangan. Ketergantungan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara realitas empiris dan kondisi ideal dalam sistem keuangan internasional. Realitasnya, dominasi USD memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada Amerika Serikat, memperkuat posisinya dalam sistem ekonomi global, dan mempengaruhi keputusan kebijakan internasional. Hal ini memungkinkan Amerika Serikat untuk memanfaatkan posisinya dalam berbagai cara, termasuk penggunaan sanksi ekonomi yang dapat menghambat negara-negara lain dalam mengakses pasar internasional dan sistem keuangan global. Sanksi ini seringkali memengaruhi negara-negara yang tidak sejalan dengan kebijakan politik atau ekonomi Amerika Serikat, menambah ketidakpastian dalam pasar global. Dominasi mata uang juga mempermudah Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri dalam rangka mengedepankan keamanan nasional (Norrlöf 2023).

*China's Dedollarization Policy Through  
BRICS Cooperation in 2022-2023*

Di tengah fenomena ini, dedolarisasi muncul sebagai bentuk langkah strategis untuk memerangi dominasi USD. Dedolarisasi merujuk pada usaha-usaha yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada USD dalam transaksi internasional dan sistem keuangan global. Upaya ini termasuk menggantikan USD dengan mata uang alternatif seperti Euro, Yuan, atau mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dan sistem pembayaran. Melalui kebijakan ini, negara-negara berupaya mengurangi dampak dari dominasi dolar dan memperkuat stabilitas ekonomi domestik mereka (Wenhong 2023).

Tiongkok, sebagai salah satu pesaing utama Amerika Serikat, telah mengembangkan berbagai kebijakan dedolarisasi, termasuk promosi penggunaan Renminbi (RMB) dalam perdagangan internasional dan pengembangan sistem pembayaran seperti *Cross-Border Interbank Payment System* (CIPS) dan *Digital Currency Electronic Payment* (DCEP) (Wending 2024). Langkah-langkah ini tidak hanya dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada USD, tetapi juga untuk meningkatkan posisi Tiongkok dalam ekonomi global dengan memberikan alternatif yang stabil dan efisien. Dengan mempromosikan RMB dan sistem pembayaran baru, Tiongkok berusaha membentuk ulang dinamika perdagangan internasional dan sistem keuangan global.

Tiongkok dan Amerika Serikat telah menghadapi ketegangan geopolitik yang kian meningkat sejak perang dagang tahun 2018. Namun, hal ini tidak menjadikan kebijakan dedolarisasi Tiongkok bertujuan untuk langsung menekan dominasi USD (Sebayang 2020). Kebijakan dedolarisasi Tiongkok didasari oleh pernyataan eksplisit yang disampaikan para akademisi dan ahli ekonomi negeri tersebut. Mereka menyampaikan kekhawatiran tentang kerentanan aset-aset Tiongkok yang dinyatakan dalam dolar. Mereka berpendapat bahwa lembaga keuangan dan perusahaan milik negara Tiongkok harus melindungi diri dari sanksi internasional potensial jika terjadi konflik militer dengan Amerika Serikat (Liu 2024). Kekhawatiran ini semakin mendesak setelah Tiongkok menaksikan sanksi kolektif Barat terhadap Rusia. Sanksi tersebut antara lain pembekuan aset-aset luar negeri Rusia yang dinyatakan dalam dolar, pelarangan penggunaan *Society for*

*Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) oleh Rusia, dan pemberhentian segala kegiatan perdagangan Rusia dengan negara-negara Barat. Sanksi ini dikenakan oleh Barat terhadap entitas dan individu Rusia untuk menghukum Presiden Vladimir Putin atas invasinya terhadap Ukraina (Rebucci dan Ahmed 2022). Para pengamat di Tiongkok menafsirkan sanksi ini sebagai peringatan bahwa aset-aset negara yang dinyatakan dalam dolar juga dapat menjadi sasaran dalam situasi serupa, apabila Tiongkok mengalami konflik militer dengan Barat di masa depan.

Kebijakan dedolarisasi yang telah dilakukan dirasa belum cukup oleh Tiongkok untuk menjamin keamanan aset negara tirai bambu tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping berusaha merumuskan berbagai kebijakan luar negeri yang cermat dan visioner, khususnya dalam isu dedolarisasi. Salah satunya adalah mendorong mitra perdagangan regional Asia dan berkembang ke seluruh dunia yang diwujudkan melalui BRICS. BRICS merupakan forum kerja sama multilateral yang beranggotakan negara-negara berkembang yang atipikal dalam kawasan mereka, dengan tingkat pendapatan per kapita menuju level menengah ke atas dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 2014). Keempat negara tersebut semuanya telah menunjukkan jangkauan kontinental dan global yang mengesankan dalam hal profil diplomatik mereka (Thakur 2018).

Berdasarkan Human Development Report (2013) yang dirilis oleh UNDP, *output* gabungan dari tiga negara berkembang terkemuka (Brasil, Cina, dan India) hampir sama dengan produk domestik bruto (PDB) gabungan dari kekuatan industri yang sudah lama ada di Utara - Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat. Dapat dikatakan, keberadaan BRICS memang untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang USD dan memberikan keuntungan maksimal kepada negara anggotanya sebagai pihak yang melakukan transaksi internasional (BBC, 2024). Kekuatan pasar masing-masing negara BRICS berpotensi menyaingi dominasi dolar Amerika Serikat. Sebanyak 40% dari total populasi dunia adalah gabungan populasi dari kelima negara BRICS. Lebih lanjut, keanggotaan BRICS mengalami

*China's Dedollarization Policy Through  
BRICS Cooperation in 2022-2023*

perkembangan setelah KTT ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan. BRICS menyambut baik pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran pada 26 April 2023 lalu. BRICS juga telah memutuskan untuk mengundang Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk menjadi anggota penuh mulai 1 Januari 2024 (BRICS 2023). Walaupun secara resmi negara-negara tersebut menjadi anggota BRICS pada awal 2024, akan tetapi UEA, Bangladesh, dan Mesir telah menjalin hubungan dengan aliansi BRICS sejak 2021.

Besarnya pengaruh perekonomian Tiongkok-BRICS membuat keduanya menjadi entitas baru yang kuat dalam perekonomian global. Tiongkok sendiri memegang peran signifikan dalam aliansi BRICS melalui besarnya kontribusi ekonomi dan kebijakan luar negeri yang progresif. Keduanya juga memiliki visi yang sama, yaitu dedolarisasi (Manini 2024). Persamaan visi dedolarisasi ini menjadi landasan penting bagi hubungan perdagangan antara Tiongkok dan negara anggota BRICS lainnya.

Tinjauan literatur mengeksplor empat isu utama yaitu: dedolarisasi, pengaruh ekonomi Tiongkok global, aliansi BRICS, dan hubungan Tiongkok-BRICS. Dedolarisasi menyoroti dominasi USD yang dimanfaatkan AS untuk kepentingan nasional, seperti sanksi ekonomi. Tren dedolarisasi, menurut Charles (2023) dan Saaideh (2023), mengindikasikan upaya negara-negara mencari alternatif moneter untuk sistem yang lebih multipolar.

Pengaruh Tiongkok dalam ekonomi global telah bergeser dari status berkembang ke aspiratif, sebagaimana disebut Bruton et al. (2019). Meski mendukung globalisasi, kebangkitan Tiongkok menantang AS melalui potensi konflik perdagangan (Grosse et al. 2020). Lebih lanjut, Jordaan (2021) dan Formici (2019) berpendapat bahwa BRICS, meski berpotensi sebagai blok ekonomi kuat, menghadapi tantangan konsistensi akibat kepentingan individu anggota. Tiongkok, sebagai pemimpin, mengintegrasikan BRICS dalam visinya untuk reformasi tata kelola global (Lukin dan Xuesong 2019). Peran ini menunjukkan pendekatan fasilitatif Tiongkok, berfokus pada pembangunan dan kebijakan makro (Wang 2022).

Penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek-aspek terpisah

dari dedolarisasi Tiongkok atau BRICS, tanpa memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan ini berinteraksi dan saling memengaruhi. Meskipun ada banyak studi yang membahas dedolarisasi Tiongkok atau peran BRICS dalam mengembangkan alternatif mata uang, kurangnya penelitian yang mengaitkan keduanya membatasi pemahaman tentang dampak sinergi antara kebijakan dedolarisasi Tiongkok dan strategi BRICS. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan dedolarisasi yang diinisiasi oleh Tiongkok dan kerja sama dalam BRICS berkontribusi pada perubahan dalam sistem keuangan global dan memengaruhi dinamika ekonomi internasional secara lebih luas.

Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan dedolarisasi Tiongkok melalui kerja sama BRICS dalam konteks sistem keuangan global saat ini. Dengan mengevaluasi literatur yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian, artikel ini berusaha untuk memberikan wawasan baru mengenai dinamika dedolarisasi dan kontribusi BRICS dalam membentuk alternatif terhadap dominasi USD. Pertanyaan riset dari tulisan ini adalah bagaimana kebijakan Tiongkok dalam melakukan dedolarisasi melalui kerja sama BRICS (2022-2023)? Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana dedolarisasi dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan internasional di masa depan.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatif untuk menganalisis kebijakan dedolarisasi Tiongkok dalam kerangka kerja sama BRICS pada tahun 2022-2023. Pada periode tersebut, BRICS semakin aktif mempromosikan perdagangan dalam mata uang lokal, yang membantu memperkuat dedolarisasi dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan yang didominasi oleh AS. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, media internet, situs resmi, surat kabar, dan buletin yang kredibel dan relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, di mana peneliti menelaah secara mendalam literatur yang ada untuk mengenali pola, tren, dan perubahan terkait kebijakan dedolarisasi Tiongkok dan BRICS.

Hasil dan diskusi dilakukan meliputi dua hal, yaitu pertama menguraikan dinamika dedolarisasi dalam kebijakan moneter, menyoroti langkah BRICS dalam merespons isu global dedolarisasi. Dedolarisasi telah berkembang sejak awal abad ke-20, dengan dominasi dolar AS dalam sistem moneter global menghadapi berbagai tantangan dari peristiwa moneter internasional. BRICS, sejak awal berdirinya, telah berkolaborasi menciptakan mekanisme independen untuk perdagangan dan keuangan, mempromosikan dedolarisasi sebagai upaya mengurangi dominasi dolar. Bab ini menjelaskan inisiatif dan langkah konkret BRICS untuk mencapai tujuan dedolarisasi, serta narasi pergeseran kekuatan global dengan Tiongkok sebagai aktor utama dalam upaya tersebut.

Kedua, diuraikan kebijakan dedolarisasi Tiongkok melalui kerja sama BRICS, dengan fokus pada tiga inisiatif utama. Pertama, pengembangan New Development Bank (NDB) sebagai lembaga keuangan yang mendukung proyek pembangunan di negara-negara BRICS. Kedua, pembentukan perjanjian penukaran bilateral (BSA) pada periode 2022-2023 untuk memperkuat hubungan ekonomi antarnegara dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Ketiga, pendirian *Cross-Border Interbank Payment System* (CIPS) yang memungkinkan transaksi internasional menggunakan mata uang lokal, khususnya renminbi (RMB). Analisis mendalam tentang inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap upaya Tiongkok dalam mengurangi ketergantungan pada dolar dan meningkatkan penggunaan RMB.

### **Dedolarisasi dalam Kebijakan Moneter Negara**

Dedolarisasi mengacu pada upaya mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar AS dalam sistem ekonomi global. Proses dedolarisasi melibatkan pembuatan kebijakan yang mendorong penggunaan mata uang lokal dan pengembangan alternatif dalam mata uang lokal untuk transaksi yang biasanya dilakukan dalam dolar AS (Fernández-Arias et al. 2006). Strategi dedolarisasi dapat dibagi menjadi dua tingkat yakni makro dan mikro. Pada tingkat makro, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti pengaturan kebijakan moneter untuk mendukung

stabilitas mata uang lokal. Misalnya, pengaturan suku bunga dan intervensi di pasar valuta asing dapat digunakan untuk menjaga nilai tukar mata uang lokal agar tetap stabil. Strategi di tingkat mikro meliputi insentif fiskal atau peraturan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bisnis dan keuangan domestik (Kokenyne et al. 2009).

Sementara itu, kebijakan moneter merupakan pilar utama dalam pengelolaan sistem ekonomi yang berfokus pada pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Dalam konteks dedolarisasi, kebijakan moneter ini memainkan peran kunci dalam mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Kebijakan ini mencakup penetapan suku bunga, pengaturan jumlah uang beredar, dan pengelolaan nilai tukar. Penetapan suku bunga, sebagai salah satu instrumen utama, memengaruhi biaya pinjaman dan investasi, sedangkan pengaturan jumlah uang beredar bertujuan untuk mencegah inflasi atau deflasi yang merugikan. Selain itu, pengelolaan nilai tukar berperan penting dalam menjaga daya saing ekspor dan impor negara (Gowland 1998). Teori kebijakan moneter ini dijelaskan oleh Walsh (2003) yang menekankan bahwa tujuan utama kebijakan moneter adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan mengendalikan inflasi.

Dedolarisasi dan kebijakan moneter saling terkait erat dalam strategi ekonomi yang lebih luas. Dengan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, negara-negara dapat memperkuat kendali mereka atas kebijakan moneter mereka sendiri, yang memungkinkan penetapan suku bunga dan pengaturan jumlah uang beredar dilakukan secara lebih otonom, tanpa terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi dolar. Selain itu, dedolarisasi juga memungkinkan pengelolaan nilai tukar yang lebih stabil, yang dapat mendukung daya saing ekspor dan impor negara.

Bank sentral memainkan peran penting dalam menerapkan kebijakan moneter yang mendukung dedolarisasi, termasuk manipulasi suku bunga, pengaturan pasokan uang, operasi pasar terbuka, dan stabilisasi mata uang. Setiap strategi bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu seperti pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas harga. Namun, tantangan dalam kebijakan moneter meliputi ketidakpastian dalam model

makroekonomi, masalah konsistensi waktu, dan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil. Ketidakpastian ini mengacu pada kesulitan dalam memprediksi dampak kebijakan terhadap berbagai variabel ekonomi, sementara konsistensi waktu berhubungan dengan kemampuan kebijakan untuk tetap efektif seiring waktu (Flood dan Isard 1989). Kepercayaan publik juga mempengaruhi efektivitas kebijakan, di mana ketidakpercayaan dapat mengurangi dampak dari kebijakan yang diterapkan (Friedman 2000).

Dedolarisasi dalam kebijakan moneter negara menjadi langkah yang signifikan dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, baik pada tingkat makro maupun mikro. Melalui kebijakan ini, negara-negara berusaha mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mendorong penggunaan mata uang lokal. Integrasi dedolarisasi dengan kebijakan moneter juga tidak hanya membantu dalam stabilisasi ekonomi, tetapi juga berperan dalam membangun kemandirian ekonomi yang lebih besar. Tantangan dalam dedolarisasi, seperti membangun kepercayaan publik terhadap mata uang lokal, perlu diatasi melalui kebijakan moneter yang kredibel dan konsisten. Dedolarisasi yang sukses, yang didukung oleh kebijakan moneter yang kuat, dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan stabilitas keuangan yang lebih besar.

### **Isu Dedolarisasi Global dan Respon BRICS**

Dedolarisasi sebagai tren global mulai mendapatkan momentum pada krisis ekonomi global, seperti krisis moneter Asia pada tahun 1997 dan krisis keuangan global pada tahun 2008. Krisis moneter Asia pada tahun 1997, yang dimulai di Thailand, menyebar ke berbagai negara di Asia Timur dan Tenggara, menunjukkan betapa rentannya ekonomi yang terlalu bergantung pada dolar. Terjadinya krisis ini meningkatkan krisis kepercayaan pada sistem keuangan Amerika Serikat, di mana hegemoni dolar Amerika Serikat berkontribusi pada kerentanan ekonomi Asia (Obstfeld dan Zhou 2022). Krisis keuangan global 2008 juga memberikan pukulan besar terhadap kepercayaan pada sistem keuangan global yang didominasi oleh dolar. Kejatuhan bank investasi Lehman Brothers

pada saat itu memicu resesi global dan mengungkap kelemahan signifikan ekonomi Amerika Serikat. Dampak dari fenomena ini adalah terjadinya krisis keuangan yang menggoncang stabilitas ekonomi global terburuk dalam tujuh dekade (Wiggins et al. 2019). Kedua peristiwa ini telah mempercepat upaya dedolarisasi di berbagai negara sebagai langkah untuk melindungi ekonomi mereka dari gejolak yang disebabkan oleh ketergantungan pada dolar.

Menyusul dinamika ini, BRICS muncul sebagai kekuatan utama yang mendorong dedolarisasi. Dalam sejarahnya, akronim “BRIC” diformulasikan pada tahun 2001 dalam sebuah laporan oleh ahli ekonom Jim O’Neill. Laporan tersebut berisi tentang perhitungan Neill mengenai prospek pertumbuhan ekonomi keempat negara pendiri yaitu Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok di masa depan. O’Neill berpendapat bahwa kemahsyuran perekonomian negara-negara ini akan meningkat dan menyaingi siapa pun hegemon ekonomi yang menguasai dunia di masa depan (O’Neill 2001). Terbentuknya BRICS didasari oleh salah satu alasan utama yaitu dedolarisasi, yang memiliki tujuan untuk menciptakan sistem moneter internasional yang lebih seimbang dan multipolar.

Sejak tahun 2015, BRICS telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk mendukung dedolarisasi. Upaya ini termasuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dan pendirian New Development Bank (NDB) (New Development Bank n.d.). NDB sebagai bank sentral aliansi ini berfungsi sebagai alternatif terhadap lembaga keuangan internasional yang didominasi oleh Barat, seperti IMF dan Bank Dunia, dengan tujuan mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota menggunakan mata uang lokal daripada dolar Amerika Serikat (New Development Bank n.d.). Dedolarisasi di antara negara-negara BRICS tidak hanya sebagai respon terhadap dominasi dolar Amerika Serikat, tetapi juga sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan peran mereka dalam perekonomian global. Negara-negara BRICS secara independen telah melakukan berbagai kebijakan dedolarisasi untuk kepentingan domestik mereka.

Sebagai negara dengan tingkat ekonomi terbesar dalam BRICS, Tiongkok menjadi negara yang aktif dalam melakukan kebijakan dedolarisasi. Tiongkok secara progresif terus mendorong penggunaan mata uang renminbi (RMB) dalam transaksi internasional, termasuk dalam kerja sama BRICS. Selain sebagai langkah strategis desolarisasi, kebijakan ini juga dilakukan Tiongkok untuk menginternasionalisasi mata uangnya. Hal ini tidak hanya membantu Tiongkok mengurangi risiko nilai tukar, tetapi juga meningkatkan pengaruh ekonominya secara global.

### **Narasi Pergeseran Kekuatan Global: Dedolarisasi Tiongkok**

Tiongkok, sebagai salah satu negara yang mencari alternatif sistem pembayaran, telah memulai upaya dedolarisasi untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dan meningkatkan posisi ekonominya di panggung global. Motivasi utama dedolarisasi Tiongkok adalah mengakhiri ketergantungan pada dolar dan merespons rivalitas dengan Amerika Serikat. Dengan kebangkitan ekonominya dalam 40 tahun terakhir, Tiongkok berusaha mengurangi penggunaan dolar untuk memperkuat ekonominya.

Rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat, dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, telah berlangsung lama dan semakin memanas dengan kebangkitan ekonomi Tiongkok. Kompetisi ini terlihat jelas dalam perang dagang yang dimulai pada tahun 2018, ketika Presiden AS Donald Trump mengklaim kerugian ekonomi Amerika Serikat akibat kebijakan perdagangan Tiongkok. Amerika Serikat menerapkan tarif impor terhadap Tiongkok, diikuti dengan tarif balasan dari Tiongkok. Negosiasi dagang yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan, dan ketegangan ini berlanjut hingga Kesepakatan Dagang Fase I pada Januari 2020. Meskipun Amerika Serikat dinyatakan kalah dalam perang dagang oleh WTO pada September 2020, dominasi dolar tetap kuat di pasar valuta asing.

Sebagai rival utama, Tiongkok berupaya mengejar capaian ekonomi dan keuntungan yang diperoleh Amerika Serikat. Sejak reformasi ekonomi di tahun 1978, Tiongkok menunjukkan pertumbuhan pesat, bahkan menggeser Jepang sebagai ekonomi

terbesar kedua di dunia pada tahun 2010. Berdasarkan artikel dari *Newsweek*, secara umum perekonomian Tiongkok dipandang dapat melampaui perekonomian Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar di dunia, dengan peningkatan PDB-nya dalam kurun waktu 10 hingga 25 tahun (Carbonaro 2023). Kesuksesan ini mencerminkan tekad Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya secara global.

Tiongkok telah menerapkan berbagai strategi dedolarisasi, termasuk internasionalisasi Renminbi (RMB), kerja sama moneter regional, dan restrukturisasi sistem moneter internasional. Tiongkok juga berupaya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di lembaga negara dan pasar keuangan, serta memperbaiki posisinya dalam sistem industri dan rantai pasok global. Ini termasuk desentralisasi *foreign direct investment* (FDI) dan meningkatkan transparansi dalam kerangka FDI (Chan dan Yang 2019). Langkah penting lainnya adalah peluncuran sistem *Cross-Border Interbank Payment System* (CIPS), yang memungkinkan transaksi internasional menggunakan RMB. Dikembangkan oleh People's Bank of China (PBOC), CIPS bertujuan untuk menyederhanakan transaksi lintas batas dalam RMB, meningkatkan penerimaan globalnya, dan mengurangi ketergantungan pada dolar. Sistem ini juga memperbaiki infrastruktur keuangan Tiongkok dengan menyediakan sistem penyelesaian bruto real-time (Long 2022). Tiongkok juga mengembangkan mata uang *Digital Currency Electronic Payment* (DCEP), atau E-yuan, untuk memfasilitasi transaksi lintas batas dan mengurangi kebutuhan akan dolar. DCEP beroperasi dalam sistem dua tingkat dengan PBOC mengawasi distribusi melalui bank komersial, dan dirancang untuk berfungsi tanpa koneksi internet, meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi pembayaran (Liu et al. 2021).

Dedolarisasi Tiongkok semakin intensif setelah konflik Rusia-Ukraina pada 2022, yang menunjukkan kerentanan aset luar negeri terhadap sanksi internasional. Tiongkok memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat dedolarisasinya melalui aliansi seperti BRICS. BRICS berupaya mengurangi pengaruh dolar dan meningkatkan keuntungan anggota dengan meningkatkan transaksi dalam mata uang lokal, mendirikan BRICS Development Bank, dan mengembangkan sistem pembayaran lintas batas yang independen dari SWIFT.

### **Kebijakan Tiongkok dalam New Development Bank (NDB)**

Tiongkok, sebagai inisiator bersama negara-negara BRICS, memainkan peran penting dalam pembentukan New Development Bank (NDB) pada tahun 2015. NDB dirancang sebagai alternatif terhadap lembaga keuangan internasional yang dominan, seperti IMF dan Bank Dunia, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan mempromosikan penggunaan mata uang lokal, khususnya Renminbi (RMB). Kebijakan dedolarisasi yang diterapkan Tiongkok melalui NDB bertujuan untuk mengurangi dominasi dolar sebagai cadangan mata uang utama dan mendorong stabilitas keuangan global (Fernández-Arias et al. 2006).

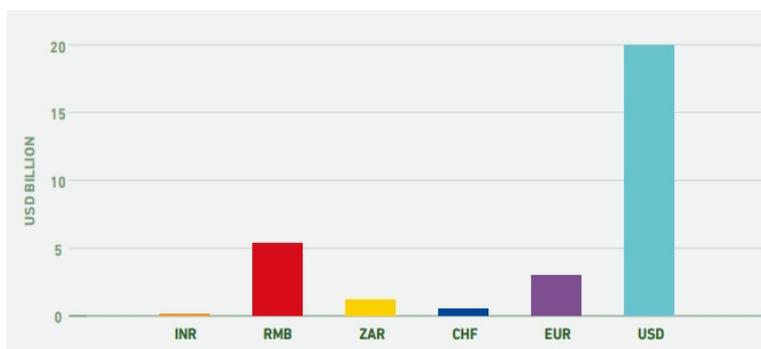
Pada tahun 2022, NDB memasuki siklus strategi lima tahun kedua dengan tema “NDB: Mengoptimalkan Dampak Pembangunan.” Pertemuan tahunan ketujuh Dewan Gubernur NDB, yang dilaksanakan secara virtual pada 19 Mei 2022, menyetujui Strategi Umum NDB untuk periode 2022-2026. Strategi ini berfokus pada penggalangan sumber daya dalam skala besar, diversifikasi portofolio proyek, penggunaan instrumen pembiayaan canggih, dan penguatan profil keuangan serta kelembagaan NDB. Pada tahun yang sama, NDB menyetujui modal awal sebesar 2,7 miliar USD untuk mendanai 14 proyek di berbagai sektor. Ini mencerminkan prioritas pembangunan negara-negara anggotanya dan upaya NDB untuk meningkatkan struktur organisasi, termasuk pendirian Kantor Evaluasi Independen (IEO) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan dampak pembangunan serta mempromosikan akuntabilitas. Selain itu, NDB juga meluncurkan Kantor Regional India (IRO) yang penting untuk meningkatkan keterlibatan dengan klien dan pemangku kepentingan di Asia Selatan. Pada akhir tahun 2022, NDB berhasil mendirikan kantor pusat di semua negara pendirinya, meningkatkan efisiensi dan organisasi dalam jaringan bisnis dan pembangunan.

Sebagai ekonomi terdepan dalam NDB, Tiongkok secara aktif terlibat dalam proyek-proyek yang didanai oleh NDB. Proyek-proyek ini mencakup pengembangan infrastruktur di negara

anggota BRICS dan sering kali menggunakan RMB sebagai mata uang pendanaan. Misalnya, pada proyek Ekspansi Fase III Bandara Internasional Lanzhou Zhongchuan, NDB menyetujui pinjaman sebesar 265 juta EUR atau sekitar 33 miliar RMB pada Juli 2022. Selain itu, proyek Ekspansi Fase III Bandara Internasional Xi'an Xian yang mendapatkan pinjaman sebesar 805 juta RMB. Dalam Program Peningkatan Jaringan Jalan Utama Guangxi, NDB memberikan pinjaman sebesar 465 juta EUR, sementara Proyek Jembatan Jalan-Kereta G3 Anhui Tongling mendapatkan pinjaman sebesar 2,19 miliar RMB (New Development Bank 2022). Tiongkok telah berhasil memanfaatkan keterlibatannya dalam proyek NDB, ditunjukkan dengan data laporan NDB pada akhir tahun 2022 bahwa sekitar 22,1% dari portofolio pembiayaan NDB didedikasikan untuk mata uang lokal, dengan sebagian besar pembiayaan proyek di Tiongkok menggunakan RMB. Gambar 2 menunjukkan portofolio pembiayaan proyek NDB berdasarkan mata uang, yang menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih menggunakan USD. Hal ini menjadi cerminan kompleksitas system keuangan global dan tantangan dalam mengubah status quo sebagaimana yang dicita-citakan dalam konsep dedolarisasi ini.

**Gambar 2.**

**Portofolio Pembiayaan Proyek NDB Berdasarkan Mata Uang**



*Sumber: New Development Bank (2022)*

NDB juga aktif dalam menerbitkan obligasi di pasar internasional dan domestik negara anggota. Tiongkok terlibat dalam strategi pendanaan ini dengan menawarkan pinjaman dalam RMB

*China's Dedollarization Policy Through  
BRICS Cooperation in 2022-2023*

dengan suku bunga lebih rendah dibandingkan USD. Penawaran ini meningkatkan daya tarik RMB di pasar global, memperluas adopsinya dalam pendanaan internasional. Pada tahun yang sama, NDB berhasil mengumpulkan dana sebesar 2,14 miliar USD melalui penerbitan obligasi dalam mata uang USD, RMB, dan AUD. Penerbitan obligasi dalam RMB mencapai nilai tertinggi sebesar 7 miliar RMB, menjadikan NDB salah satu penerbit obligasi RMB terbesar (Lihat Gambar 3). Hal ini mencerminkan kepercayaan investor yang kuat terhadap NDB dan memperkuat posisi RMB di pasar global.

**Gambar 3.**  
**Tolak Ukur Obligasi NDB Pada Tahun 2022**

| Bond                     | Amount        | Issue date       | Maturity date    | Annual coupon rate |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2022 RMB BOND (SERIES 1) | RMB 3 billion | January 27, 2022 | January 27, 2025 | 2.45%              |
| 2022 RMB BOND (SERIES 2) | RMB 7 billion | May 20, 2022     | May 20, 2024     | 2.70%              |
| 2022 RMB BOND (SERIES 3) | RMB 3 billion | October 26, 2022 | October 26, 2025 | 2.53%              |

*Sumber: New Development Bank (2022)*

Dalam laporan akhir tahun 2022, proyek-proyek di Tiongkok dan India tercatat sebagai sebagai negara yang paling banyak didanai oleh NDB. Upaya Tiongkok dalam memperluas penggunaan RMB dan dedolarisasi terus berlanjut dengan strategi yang sama pada tahun 2023. Presiden NDB, Dilma Rousseff, menekankan prioritas pengumpulan dana dalam mata uang lokal dan dukungan untuk proyek-proyek yang lebih besar. Ekspansi keanggotaan NDB, termasuk penambahan Bangladesh, Uni Emirat Arab, dan Mesir, menunjukkan upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruh dan mempromosikan dedolarisasi serta memperkuat kerja sama dengan negara-negara berkembang dan ekonomi baru.

Tiongkok berperan penting dalam menentukan arah dan kebijakan bank sentral aliansi BRICS. Tiongkok telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisinya dalam NDB, mendukung dedolarisasi, dan mempromosikan penggunaan RMB sebagai alat pembayaran internasional, yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi global dan pengembangan infrastruktur di negara-negara anggota BRICS. Penggunaan RMB telah meningkat secara signifikan dalam pembiayaan infrastruktur dan proyek-proyek pada negara anggota BRICS melalui NDB. Hal ini mencerminkan upaya Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan

terhadap dolar Amerika Serikat dan meningkatkan stabilitas ekonomi global.

### **Perjanjian Penukaran Bilateral Tiongkok 2022-2023**

Perjanjian penukaran bilateral atau *Bilateral Swap Agreement* (BSA) merupakan sebuah kesepakatan keuangan antara dua bank sentral yang memungkinkan mereka untuk saling menukar mata uang dengan kurs yang ditentukan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu (Song dan Xia 2020). Melalui Bank Rakyat Tiongkok atau People's Bank of China (PBOC), Tiongkok telah memperluas dan memperdalam perjanjian penukaran mata uang bilateral dengan banyak negara untuk memperkuat peran RMB dalam sistem moneter internasional. Strategi ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional tanpa ketergantungan pada dolar AS serta mengembangkan pasar RMB global.

Perjanjian penukaran bilateral yang dilakukan Tiongkok dengan negara-negara BRICS menjadi salah satu alat penting dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dan keuangan dalam strategi dedolarisasi. Sistem ini mengacu pada kesepakatan dalam pertukaran mata uang lokal antarnegara tanpa perlu melibatkan dolar Amerika Serikat sebagai perantara. Dengan kata lain, perjanjian penukaran bilateral menggambarkan suatu langkah dedolarisasi. Langkah dedolarisasi dalam perjanjian ini diindikasikan dengan proses mengembangkan alternatif dalam promosi mata uang lokal, yaitu menciptakan opsi penggunaan mata uang lokal untuk transaksi dan investasi yang biasanya dilakukan dalam dolar Amerika Serikat (Haungton 2004). Tiongkok telah melakukan berbagai perjanjian penukaran bilateral dengan negara-negara anggota BRICS lainnya sejak tahun 2013. Namun, sanksi terhadap Rusia pada awal tahun 2022 memberikan peringatan kepada Tiongkok untuk lebih gencar dalam melangsungkan kebijakan dedolarisasi. Salah satu siasat Tiongkok adalah dengan melakukan pembaharuan perjanjian penukaran bilateralnya dengan negara BRICS, khususnya Rusia.

Sejak penandatanganan perjanjian penukaran bilateral pertama pada tahun 2014, hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Rusia

*China's Dedollarization Policy Through  
BRICS Cooperation in 2022-2023*

telah berkembang pesat. Pada tahun 2017, perjanjian tersebut diperbarui untuk mengakomodasi perubahan dalam dinamika perdagangan. Namun, dampak sanksi Barat terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina pada 2022 memberikan dorongan signifikan terhadap penggunaan RMB. Sanksi internasional membuat Rusia menghadapi kesulitan dalam melakukan transaksi menggunakan dolar AS dan euro. Banyak bank Rusia kehilangan akses ke sistem keuangan Barat, memaksa Rusia untuk mencari alternatif. RMB muncul sebagai solusi praktis. Pada 2022, RMB menjadi mata uang utama dalam perdagangan Rusia, menggantikan dolar dan euro (Kluge 2024).

Perjanjian penukaran bilateral antara Rusia dan Tiongkok telah memainkan peran penting dalam membantu Rusia mengelola cadangan devisanya, mengurangi ketergantungan pada dolar AS, dan menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pada akhir tahun 2022, Rusia telah meningkatkan proporsi cadangan likuidnya dalam RMB hingga 60%, menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap stabilitas RMB di tengah fluktuasi ekonomi global (Essen 2023). Lebih lanjut pada tahun 2023, proporsi penggunaan RMB dalam perdagangan internasional Rusia mengalami peningkatan signifikan. Menurut data terbaru, RMB kini menyumbang 40,8% campuran mata uang dari ekspor Rusia (Kluge 2024). Ini menunjukkan lonjakan signifikan dari penggunaan RMB dibandingkan periode sebelumnya. Dominasi yuan dalam perdagangan Rusia ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk hubungan bilateral yang semakin erat dengan Tiongkok, serta upaya bersama dalam menghadapi tekanan ekonomi dari Barat. Sanksi dari Barat memberikan dampak peningkatan yang progresif dari RMB dalam mendominasi peredaran mata uang di Rusia selama satu tahun (Lihat Gambar 4).

**Gambar 4.**  
**Campuran Mata Uang Dari Ekspor Rusia**



*Sumber: Kluge (2024)*

Sementara itu, dalam campuran mata uang yang digunakan untuk impor, mata uang Tiongkok juga unggul dengan persentase 37,5% dari seluruh campuran mata uang. Hal ini menunjukkan pergeseran yang jelas dari dominasi mata uang Barat, terutama dolar Amerika Serikat dan euro, yang beralih ke arah RMB milik Tiongkok. Penggunaan RMB yang tinggi dalam impor Rusia mencerminkan kepercayaan yang meningkat terhadap stabilitas dan keandalan mata uang lokal Tiongkok di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu (Lihat Gambar 5).

**Gambar 5.**  
**Campuran Mata Uang Dari Impor Rusia**



*Sumber: Kluge (2024)*

Perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Rusia juga menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2022, volume perdagangan antara kedua negara mencapai 190 miliar USD, meningkat 29,3% dibandingkan tahun sebelumnya (General Administration of Customs of the People's Republic of China 2022). Pada tahun 2023, volume perdagangan ini terus meningkat, dengan puncaknya terjadi pada Maret 2023 ketika perdagangan bulanan melampaui 20 miliar USD untuk pertama kalinya (Essen 2023). Kesepakatan penukaran baru yang ditandatangani pada Februari 2023 lebih lanjut meningkatkan ketersediaan RMB di Rusia dan memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara. Ditambah lagi, sejak tahun 2023, India mulai membeli minyak Rusia dengan menggunakan mata uang renminbi, mata uang Saudi, dan rubel. Rusia dan Tiongkok memperdagangkan minyak, batu bara, dan logam Rusia dalam renminbi. Rusia bersama sekelompok negara di Afrika juga memulai diskusi untuk melakukan transaksi dengan mata uang nasional masing-masing, menghapus penggunaan dolar AS dan euro (Li 2023).

Hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Uni Emirat Arab (UEA) di Timur Tengah juga mengalami perkembangan yang signifikan. UEA telah menjadi salah satu mitra dagang utama Tiongkok di kawasan tersebut, terutama dalam sektor energi, di mana UEA menyediakan antara 34% hingga 40% dari total pasokan energi impor Tiongkok dalam dua dekade terakhir. Hubungan ini diperkuat dengan perjanjian penukaran bilateral pertama yang ditandatangani pada tahun 2012 dan diperbarui pada tahun 2023 dengan nilai 4,9 miliar USD. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama keuangan dan mempermudah penggunaan RMB dalam transaksi lintas batas antara kedua negara (Kumar 2023).

Sebagai bagian dari upaya dedolarisasi, pada Desember 2022, Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong negara-negara Teluk untuk mempertimbangkan transaksi dalam RMB. UEA menjadi negara Teluk pertama yang menjual gas alam cair menggunakan RMB pada Maret 2023, memperkuat posisi RMB sebagai alternatif pembayaran dalam perdagangan global (Alfarhan dan Alsudairi 2024). Dengan keanggotaan UEA dalam BRICS, aliansi ini mendapatkan keuntungan strategis di Timur Tengah, mendukung visi BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memperluas kerja sama ekonomi serta keuangan di tingkat global.

### ***Perkembangan Cross Border Inter-Bank Payment System (CIPS)***

*Cross-Border Interbank Payment System* (CIPS) diluncurkan pada 2015 oleh Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) untuk memfasilitasi transaksi lintas batas dalam renminbi (RMB) sebagai alternatif dari sistem SWIFT yang didominasi dolar AS. CIPS memainkan peran penting dalam aliansi BRICS dengan memperkuat kerja sama ekonomi dan integrasi keuangan di antara negara-negara anggotanya. Sistem ini telah diadopsi oleh beberapa negara BRICS, termasuk Rusia dan India, untuk mendukung dedolarisasi dan mengurangi ketergantungan pada dolar dalam perdagangan internasional. CIPS juga menawarkan efisiensi lebih tinggi dengan biaya transaksi lebih rendah dan penyelesaian lebih cepat.

*China's Dedollarization Policy Through  
BRICS Cooperation in 2022-2023*

CIPS yang dikembangkan oleh Tiongkok telah menarik perhatian global sebagai alternatif dari sistem pembayaran SWIFT, terutama setelah sanksi Barat terhadap Rusia. Diluncurkan pada tahun 2015, CIPS mendukung penggunaan renminbi (RMB) dalam transaksi internasional dan bertujuan untuk menyediakan opsi penyelesaian non-USD bagi negara-negara di dunia.

Sejak peluncurannya, CIPS telah berkembang pesat, dengan nilai transaksi mencapai 80 triliun RMB pada tahun 2021, meningkat 75% dari tahun sebelumnya (Nikoladze et al. n.d.). Pada tahun 2023, sistem ini terus berkembang dengan keanggotaan dari berbagai lembaga keuangan global, termasuk negara-negara BRICS seperti Rusia dan Brasil. Keanggotaan CIPS terus berkembang, mencakup 1.304 peserta pada Maret 2022, terdiri dari 76 peserta langsung dan 1.228 peserta tidak langsung dari 104 negara dan wilayah di seluruh dunia (CIPS 2022).

Negara-negara BRICS, khususnya Rusia, mulai memanfaatkan CIPS sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Rusia dan Tiongkok menjadi pengguna CIPS yang paling menonjol dalam BRICS, dengan Rusia yang secara aktif menggunakan sistem ini untuk melakukan transaksi energi dengan Tiongkok, termasuk pembayaran untuk ekspor minyak dan batu bara (Rosen 2022). Rusia juga berusaha menghubungkan sistem keuangannya dengan CIPS, meskipun akses langsung ke sistem ini masih terbatas karena hanya lembaga keuangan Tiongkok yang diizinkan menjadi anggota langsung. Namun, cabang-cabang bank Tiongkok di Rusia telah memfasilitasi transaksi RMB lintas batas, memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

Brasil juga menunjukkan minat yang kuat untuk terintegrasi dengan CIPS. Pada Maret 2023, Bank of Communications BBM di Rio de Janeiro menjadi bank pertama di Amerika Latin yang mendaftar ke CIPS. Bank ini dikendalikan oleh Bank of Communications Co. dari Tiongkok, yang memungkinkan transaksi RMB dilakukan nonstop. Ini menunjukkan langkah signifikan Brasil dalam mendiversifikasi metode pembayarannya dan memperluas penggunaan RMB dalam perdagangan internasional. Di sisi lain, Afrika Selatan telah mulai mengadopsi CIPS sejak 2016, dengan beberapa bank kliring renminbi yang

aktif beroperasi di negara tersebut. Sementara itu, India sedang dalam tahap pembahasan untuk meningkatkan penggunaan CIPS dan infrastruktur keuangan terkait BRICS lainnya.

Upaya dedolarisasi Tiongkok melalui CIPS mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan BRICS untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil dan seimbang. CIPS memainkan peran strategis dalam upaya dedolarisasi Tiongkok melalui aliansi BRICS yang menawarkan alternatif bagi negara-negara anggota untuk beralih dari sistem pembayaran berbasis dolar, dengan Tiongkok mempromosikan penggunaan RMB di antara negara-negara BRICS. Dengan mendorong penggunaan RMB dalam transaksi pembayaran, Tiongkok berhasil memperkuat posisi mata uangnya sebagai alat pembayaran utama dalam transaksi internasional. CIPS telah menjadi salah satu langkah kunci dalam membangun sistem keuangan yang lebih adil dan seimbang, sesuai dengan visi BRICS untuk kemandirian keuangan.

Berdasarkan implementasi ketiga kebijakan yang telah dipaparkan, tulisan ini menemukan bahwa Tiongkok akan menghadapi tantangan dalam panggung internasional yang dapat menurunkan peluang-peluang dari kebijakan dedolarisasinya. Dalam kenyataannya, meskipun berbagai inisiatif strategis dedolarisasi telah dilakukan oleh Tiongkok, hingga saat ini Tiongkok masih belum bisa menggantikan dominasi penggunaan USD. Bahkan, data cadangan devisa menunjukkan bahwa pada kuartal keempat 2023, cadangan devisa dalam RMB hanya mencapai 261,73 miliar USD, jauh di bawah dominasi dolar AS yang lebih dari 6 triliun USD (International Monetary Fund 2023). Meskipun demikian, dalam konteks geopolitik global, upaya Tiongkok dalam dedolarisasi merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius dari Amerika Serikat, terutama karena potensi dampaknya terhadap dominasi dolar dalam jangka panjang.

## **Simpulan**

Dominasi dolar Amerika Serikat (USD) dalam sistem keuangan global telah berlangsung lama, menciptakan ketidaksetaraan

dan ketidakstabilan yang dirasakan oleh berbagai negara. Negara-negara lain semakin menyadari perlunya mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan mencari alternatif baru dalam sistem pembayaran internasional. Pada tahun 2022, invasi Rusia terhadap Ukraina dan sanksi ekonomi Barat terhadap Rusia menunjukkan risiko tinggi dari ketergantungan pada dolar, mendorong Tiongkok untuk mempercepat upaya dedolarisasinya. Situasi ini menyoroti kekhawatiran Tiongkok akan potensi risiko serupa dan memotivasi negara tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada dolar melalui berbagai strategi, termasuk melalui aliansi BRICS.

Tiongkok bersama dengan anggota BRICS lainnya telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis untuk mengatasi dominasi dolar. Selama periode 2022 hingga 2023, beberapa langkah penting telah dijalankan, termasuk pengembangan New Development Bank (NDB), pembentukan perjanjian penukaran bilateral (BSA), dan pendirian *Cross-Border Interbank Payment System* (CIPS). Ketiga langkah tersebut berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada USD dengan memfokuskan pada penggunaan mata uang lokal, terutama RMB. Upaya Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan pada USD dapat dipahami sebagai langkah penting dalam membangun sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Meskipun langkah-langkah strategis telah dilakukan Tiongkok, RMB masih menghadapi tantangan besar. Hal ini menggarisbawahi tantangan signifikan dalam upaya Tiongkok untuk meningkatkan peran RMB secara global. Meskipun demikian, melalui BRICS dan berbagai inisiatifnya, Tiongkok berusaha mengurangi ketergantungan global pada dolar dan membangun sistem pembayaran alternatif yang lebih mandiri. Langkah-langkah yang diambil Tiongkok tersebut juga secara nyata menunjukkan pergeseran menuju multipolaritas dalam sistem moneter internasional. Proses ini, meskipun lambat, dapat berdampak signifikan pada dinamika keuangan global di masa depan.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terlibat dalam Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah membantu rangkaian proses penulisan tulisan ini.

## **Tentang Penulis**

**Diva Calista Hananto** adalah mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui [calistahanantodiva@gmail.com](mailto:calistahanantodiva@gmail.com).

**Wiwiek Rukmi Dwi Astuti** adalah dosen tetap pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana Hubungan Internasional pada Universitas Padjadjaran pada tahun 2012 dan pendidikan magister Hubungan Internasional pada Universitas Indonesia pada tahun 2015. Penulis mendalami kajian Ekonomi Politik Global, Rezim Internasional, dan Tata Kelola Global. Penulis dapat dihubungi melalui [wiwiek.rukmi@upnvj.ac.id](mailto:wiwiek.rukmi@upnvj.ac.id).

## **Referensi**

### **Buku dan Bab dalam Buku**

- Gowland, David, 1998. "Money and Monetary Policy", dalam Gowland, David, 1998. *Applied Economics*. London: Palgrave.
- Thakur, Ramesh, 2018. "How representative are BRICS?", dalam Weiss, Thomas, dan Adriana Abdenur, 2018. *Emerging Powers and the UN*. London: Routledge.
- Walsh, Carl, E, 2003. *Monetary Theory and Policy, Third Edition*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press.

## **Jurnal dan Artikel Jurnal**

- Alfarhan, Mai, dan Mohammed Alsudairi, 2024. "The Past, Present, and Future of Gulf Sovereign Wealth Fund Investments in China." *Middle East Policy*, **31** (1): 66-87.
- Bruton, Garry, D., 2019. "China has emerged as an aspirant economy", *Asia Pacific Journal of Management*, **38** (2021): 1-15.
- Casarini, N., & Otero-Iglesias, M. (2023, November). China's trend towards de-dollarisation and the role of the EU. In *EU and China between De-Risking and Cooperation: Scenarios by 2035* (pp. 74-84). Jacques Delors Institute.
- Chan, James, L., dan Yang Quanshe, 2019. "New development: China seeks better capital investment and credit assessment", *Public Money & Management*, **40** (1): 81-84.
- Fernández-Arias, E. et al., 2006. "Financial dollarization and dedollarization", *Economía*, **6** (2): 37-100.
- Formici, Giulia, 2019. "The Role of BRICS Group in The International arena: a legal network under construction", *Third World Thematics: A TWQ Journal*, **4** (6): 459-474.
- Grosse, Robert, et al., 2020. "China's Rise, World Order, and the Implications", *Management International Review*, **61** (1):1-26.
- Jordaan, André C, 2021. "BRICS—quo vadis?", *Development Southern Africa*, **38** (3): 454-468. (UNDP, 2013)
- Kluge, Janis, 2024. "Russia-China economic relations: Moscow's road to economic dependence", *Stiftung Wissenschaft und Politik Research Paper*, 6: 1-39.
- Liu, Xinyu, et al., 2021. "The Progress of Digital Currency Electronic Payment", *Advances in Economics, Business and Management Research*, 203.
- Lukin, Alexander, dan Fan Xuesong, 2019. "What is BRICS for China?", *Strategic Analysis* **43** (6): 620-631.
- Saaideh, Mohammed, 2023. "Geopolitical Implications of De-Dollarization: Shifting Power Dynamics and USA's Global In-

fluence”, *Sciences for All Publications*, **1** (1).

Wang, A. Xinhe, 2022. “China’s Leadership in BRICS Governance”, *International Organisations Research Journal*, **17** (2): 50-85.

Wenhong, Xu, 2023. “Dedollarization as a Direction of Russia’s Financial Policy in Current Conditions”, *Studies on Russian economic development*, **34** (1): 9-18.

Wiggins, Rosalind, Z. et al., 2019. “The Lehman brothers bankruptcy a: overview”, *Journal of financial crises*, **1** (1): 39-62.

Song, Ke, dan Le Xia, 2020. “Bilateral swap agreement and renminbi settlement in cross-border trade”, *Economic and Political Studies*, **8** (3): 355-373.

### **Working Paper**

Friedman, Benjamin, M., 2000. “Monetary Policy”, National Bureau Economic Research Working Paper, No. 8057.

Flood, Robert, P., dan Peter Isard, 1989. “Monetary policy strategies”, Staff Papers, No. 3.

Haungton, Andre, Y., 2004. “Financial Dedollarization of the Jamaican Economy: A Portofolio Approach”, Bank of Jamaica Working Paper WP 2004.

Kokenyne, Annamaria, et al., 2009. “IMF Working Paper: Dedollarization”.

Li, Yuefen, 2023. “Trends, reasons and prospects of de-dollarization”, South Center Research Paper, 1-20.

### **Berita**

BBC, 2024. “BRICS: What is the group and which countries have joined?” [daring]. dalam <https://www.bbc.com/news/world-66525474> [Diakses pada Juni 2024]

*China's Dedollarization Policy Through  
BRICS Cooperation in 2022-2023*

- Carbonaro, Giuila, 2023. "How China's Economy Collapsing Would Impact the U.S" [daring]. dalam <https://www.newsweek.com/how-china-economy-collapsing-impact-us-1822194> [Diakses pada 5 Januari 2024].
- Kumar, Pramod, 2023. "UAE and China renew \$4.9bn currency swap deal" [daring]. dalam <https://www.agbi.com/trade/2023/11/uae-and-china-renew-4-9bn-currency-swap-deal/> [Diakses pada Juni 2024].
- Rosen, Phil, 2022. "China is buying Russian energy with its own currency, marking the first commodities paid for in yuan since Western sanctions hit Moscow" [daring]. dalam <https://markets.businessinsider.com/news/commodities/dollar-vs-yuan-china-buys-russian-oil-coal-ukraine-sanctions-2022-4> [Diakses pada Juni 2024].
- Sebayang, Rehia, 2020. "Xi Jinping Kalahkan Trump, Ini Sejarah Perang Dagang China-AS" [daring]. dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200916124053-4-187231/xi-jinping-kalahkan-trump-ini-sejarah-perang-dagang-china-as?page=all> [Diakses pada 8 Januari 2024].

## **Website Resmi**

- BRICS, 2023. "XV BRICS Summit Johannesburg II Declaration" [daring]. dalam <https://brics2023.gov.za/wp-content/uploads/2023/08/Jhb-II-Declaration-24-August-2023-1.pdf> [Diakses pada Juni 2024].
- CIPS, 2022. "CIPS Participants Announcement No. 75" [daring]. dalam [https://www.cips.com.cn/en/2022-03/31/article\\_2023122305150998437.html](https://www.cips.com.cn/en/2022-03/31/article_2023122305150998437.html) [Diakses pada Juni 2024].
- Congressional Research Service (CRS), 2022. "The U.S. Dollar as the World's Dominant Reserve Currency" [daring]. dalam <https://sgp.fas.org/crs/row/IF11707.pdf> [Diakses pada 1 Januari 2024].
- General Administration of Customs of the People's Republic of China, 2022. "Review of China's Foreign Trade in the First Quarter of 2022" [daring]. dalam <http://english.customs.gov.cn/Statics/1c638dfe-a503-4d95-b8c5-afceb11114b4>.

[html](#) [Diakses pada Juni 2024].

International Monetary Fund, 2023. "Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER)" [daring]. dalam <https://data.imf.org/?sk=e6a5f467-c14b-4aa8-9f6d-5a09ec4e62a4> [Diakses pada Februari 2024].

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2014. "Learn about BRICS" [daring]. dalam <https://www.ipea.gov.br/forumbrics/en/learn-about-brics.html> [Diakses pada 27 Januari 2024].

New Development Bank, n.d. "About NDB: Objectives and Projects" [daring]. dalam <https://www.ndb.int/about-ndb/> [Diakses pada 27 Juli 2024].

## **Laporan**

Essen, H. Von, 2023. Russia-China Economic Relations Since the Full-Scale Invasion of Ukraine. Swedish National China Centre dan Stockholm Centre For Eastern European Studies Report No. 2.

New Development Bank, 2022. Annual Report 2022: Building a Leading Development Bank for Emerging Economies.

O'Neill, Jim 2001. Building Better Global Economic BRICs. London: London: Goldman Sachs Economic Research Group.  
UNDP, 2013. Human Development Report 2013: The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. New York. UNDP.

## **Artikel Daring**

Charles, Ken, 2023. "De-Dollarization" [daring]. dalam [https://www.researchgate.net/publication/369088676\\_De-Dollarization](https://www.researchgate.net/publication/369088676_De-Dollarization) [Diakses pada Januari 2024].

Liu, Z. Zongyuan, 2024. "China Wants To Ditch The Dollar" [daring]. dalam <https://www.noemamag.com/china-wants-to-ditch-the-dollar/> [Diakses pada Mei 2024].

*China's Dedollarization Policy Through  
BRICS Cooperation in 2022-2023*

- Long, Ke, 2022. "China's Cross-Border Interbank Payment System: The First Step in the RMB's Internationalization" [daring]. dalam <https://www.tokyofoundation.org/research/detail.php?id=895> [Diakses pada Juni 2024].
- Manini, 2024. "Economic pragmatism vs. geopolitical principles in a post-dollar era" [daring]. dalam <https://www.orfonline.org/expert-speak/economic-pragmatism-vs-geopolitical-principles-in-a-post-dollar-era> [Diakses pada Juni 2024].
- Nikoladze, Maia, n.d.. "Dollar Dominance Monitor" [daring]. dalam <https://www.atlanticcouncil.org/programs/geoeconomics-center/dollar-dominance-monitor/> [Diakses pada Juni 2024].
- Norrlöf, Carla, 2023. "Dollar dominance: Preserving the US dollar's status as the global reserve currency" [daring]. dalam <https://www.atlanticcouncil.org/commentary/testimony/dollar-dominance-preserving-the-us-dollars-status-as-the-global-reserve-currency/> [Diakses pada 27 Januari 2024].
- Obstfeld, Maurice, dan Haonan Zhou, 2022. "The Global Dollar Cycle" [daring]. dalam <https://www.brookings.edu/articles/the-global-dollar-cycle/> [Diakses pada Juni 2024].
- Rebucci, Alessandro, dan Rashad Ahmed, 2022. "The Russian reserves freeze and US interest rates: Side effects and spillbacks" [daring]. dalam <https://cepr.org/voxeu/columns/russian-reserves-freeze-and-us-interest-rates-side-effects-and-spillbacks> [Diakses pada Mei 2024].
- Wendling, Julia, 2024. "The Start of De-Dollarization: China's Gradual Move Away from the USD" [daring]. dalam <https://www.visualcapitalist.com/sp/hfo2-start-of-de-dollarization-chinas-gradual-move-away-from-the-usd/> [Diakses pada Mei 2024].